

Daftar Rancangan Rencana Aksi (Draft 3)

Open Government Indonesia Tahun 2018-2020

Update: 18 November 2018

No	Aksi	Sasaran	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
Komitmen Global						
1	Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan. (Berdasarkan Aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2019-2020)	Tersedianya dan dimanfaatkannya basis data Beneficial Ownership.	1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi. 2. Digunakannya basis data Beneficial Ownership untuk pencegahan penyalahgunaan legal persons/arrangements untuk tujuan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan penyalahgunaan perpajakan. 3. Digunakannya basis data Beneficial Ownership sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Keuangan 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 8. Kementerian Perdagangan 9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 11. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi	PWYP Indonesia
2	Menyediakan informasi dan data Penerima Bantuan luran yang partisipatif	1. Tersedianya Data PBI sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat 2. Tersusunnya Aplikasi SIKS NG Modul PBI 3. Tersusunnya surat penetapan PBI JK	1. Tersedianya Daftar PBI yang diusulkan oleh masyarakat melalui musdes/ muskel ataupun platform lainnya 2. Aplikasi SIKS Modul PBI 3. Tersusunnya 12 surat keputusan penetapan/ perubahan peserta PBI JK	Kementerian Sosial	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)	Medialink

3	Meningkatkan keterbukaan data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Kementerian/ Lembaga dan daerah	1. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga	1. Terbangunnya komitmen publikasi data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan antara Kementerian Keuangan dan K/L terkait 2. Terpublikasinya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan sampai dengan level kegiatan di portal data APBN	Kementerian Keuangan	Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Kantor Staf Presiden Komisi Informasi Pusat	SEKNAS FITRA
		2. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Daerah	1. Terbangunnya portal data APBD (E-Budgeting) 2. Terlaksananya implementasi E-Budgeting di 34 provinsi	Kementerian Dalam Negeri		
4	Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan Partisipatif	Tersediannya usulan perencanaan anggaran pendidikan berbasis data NPD	1. Sosialisasi halaman NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah 2. Terselenggaranya kegiatan/forum konsultasi perencanaan anggaran pendidikan dengan masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ombudsman RI Kementerian Dalam Negeri	Transparency Indonesia
5	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa yang Akuntabel	1. Terlaksananya penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif	1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa (<i>lokus Desa berbeda dari tahun sebelumnya</i>) pada 3 Provinsi (Maluku, Jawa Tengah dan Sumatera Barat) 2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)	Kantor Staf Presiden Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	Pattiro dan WVI
		2. Tersedianya harmonisasi peraturan Kementerian Desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa	1. Tersedianya Draft Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 2. Tersedianya Draft Permendesa tentang Pendampingan Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi.	Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui platform E-Legislasi. 2. Tersedianya platform E-Legislasi dalam website DPRD di 5 kabupaten/ kota.	Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otonomi Daerah)	Komisi Informasi Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Informasi dan Komunikasi Publik)	IPC
7	Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Terciptanya transparansi data kepiluan yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Terintegrasinya data penyelenggaraan pemilu pada portal satu data 2. Tersedianya publikasi hasil pemungutan suara (form C1)	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Kantor Staf Presiden Bawaslu RI Kementerian Dalam Negeri	PERLUDEM

8	Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah	Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah	1. Tersedianya data tempat tidur dan ketenagaan di Puskesmas 2. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM dan jumlah tempat tidur di rumah sakit	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri	ICW
9	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Instansi Pemerintah	Terlaksananya forum konsultasi publik di Instansi Pemerintah	1. Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah 2. Daftar Instansi Pemerintah yang sudah melaksanakan FKP. 3. 3 (tiga) pilot project Instansi Pemerintah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Desa dan PDT Kementerian Dalam Negeri	Yappika Action Aid
10	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dalam LAPOR!-SP4N	1. Peningkatan jumlah keterhubungan LAPOR-SP4N 2. Peningkatan jumlah pengaduan ditindaklanjuti dalam LAPOR-SP4N 3. Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan SOP LAPOR-SP4N	1. Sebanyak 500 Instansi Pemerintah terhubung dengan LAPOR!-SP4N. 2. Sebanyak 25 % pengaduan yang masuk ke LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti 3. Sebanyak 15 % pengelolaan LAPOR!-SP4N oleh Instansi Pemerintah masuk kategori BAIK.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kantor Staf Presiden Ombudsman RI Kementerian Dalam Negeri	Yappika Action Aid
11	Pengembangan Sistem Pelayanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Sistem Pelayanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Optimalisasi peran humas pada aplikasi LAPOR! 2. Penyempurnaan SOP tata kelola pengaduan satu pintu	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian PAN dan RB Kantor Staf Presiden Ombudsman RI	ICEL
12	Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif	1. Tersedianya update SK LKPP terkait Daftar Informasi Publik untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP 2. Tersedianya rekomendasi implementasi SK DIP Barang dan jasa pemerintah 3. Pemanfaatan SPSE dalam seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima) 4. Workshop pengawasan pengadaan barang/jasa kepada organisasi masyarakat sipil baik di pusat maupun daerah 5. Terlaksananya konsultasi publik terkait dengan pengaturan DIP PBJ di pemerintah pusat oleh KIP 6. Terbitnya Perki Terkait dengan DIP PBJ di pemerintah pusat oleh KIP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Informasi Pusat	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	ICW

13	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik berbasis prinsip Satu Data Indonesia	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas berbasis elektronik.	<p>1. Revisi Perki No.1/2010 tentang standar layanan informasi publik dengan menambahkan mekanisme pelayanan informasi publik secara elektronik</p> <p>2. Lima provinsi dengan minimum 50% kota/kab yang terhubung dengan mekanisme pelayanan informasi publik secara elektronik dengan menggunakan LAPOR!</p> <p>3. Tersosialisasikannya prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di 5 provinsi.</p> <p>4. Terselenggaranya pemeringkatan Badan Publik oleh KI provinsi dengan tambahan indikator prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.</p>	Komisi Informasi Pusat (KIP)	<p>Kantor Staf Presiden</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara</p>	Open Data Lab FION PlanC
14	Perluasan serta Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Bantuan Hukum	Tersedianya kerangka regulasi dan peningkatan pelayanan bantuan hukum di daerah	<p>1.Tersedianya Perda Bantuan Hukum di 100 kabupaten/kota meningkat 21 Provinsi.</p> <p>2.Tersedianya total anggaran bantuan hukum dari APBD meningkat menjadi Rp 20 milyar (menggunakan prosentase)</p> <p>3. Tersedianya 600 OBH di 210 kabupaten.</p> <p>4.Bertambahnya Jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi dan pendampingan hukum) meningkat menjadi 20.000 orang.</p> <p>5.Indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum membaik, di mana 50% penerima bantuan hukum menyatakan cukup puas dan sangat puas.</p>	Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Komitmen Nasional						
15	Penguatan tata kelola penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	<p>1. Penyempurnaan roadmap (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi peta jalan OGI dan alat ukur keterbukaan pemerintah)</p> <p>2. Implementasi rencana kerja tim koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, donor meeting, termasuk implementasi renaksi 2018-2020)</p>	Bappenas	<p>Kantor Staf Presiden</p> <p>Kementerian Luar Negeri</p> <p>Kementerian Keuangan</p>	Medialink dan INFID
16	Pengarusutamaan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan Smart City	Teradopsinya nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah dalam pelaksanaan Smart City	<p>1. 25 kota/ kabupaten pelaksana Smart City mendapatkan informasi terkait nilai-nilai keterbukaan pemerintah</p> <p>2. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi ataupun panduan Smart City yang memuat nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah</p>	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Dalam Negeri Kantor Staf Presiden	TII / ICW Medialink INFID IPC